

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI, DAN KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir)**

Oleh:

Adria Pratama Putri

Pembimbing : Taufeni Taufik dan Susilatri

Departement of Accounting, Faculty of Economics, Riau University

Pekanbaru, Indonesia

E-mail : adria_hnsdream@yahoo.com

*The Effect Of The Internal Control System, The Accounting Information System,
And The Financial Administration Officials Competence On The Value
Of Local Financial Reporting Information
(Study on Regional Working Unit Rokan Hilir Regency)*

ABSTRACT

This study aim was finding out the effect of the internal control system, the accounting information system and the financial administration officials competence on the value of local financial reporting information at Regional Working Unit Rokan Hilir regency. The respondents were head of finance section and expenditure treasurer. The sample was determined by purposive sampling technique. Total of respondents in this research are 66 of respondents. The data of this research used was primary data. The method of data collection was questionnaire. The technique of data analysis was multiregression analysis using SPSS version 20.00. The result showed that the internal control system, accounting information system, and the financial administration official competence an effect on the value of local financial reporting information. The coefficient of determination showed the internal control system, accounting information system, and the financial administration official competence an effect on the value of local financial reporting information amounted to 51,8% and the remaining 48,2% an effected by other variables that's not included in this study as the information technology, etc.

Keywords: Information value, internal control, accounting information, and competence administration official

PENDAHULUAN

Di pemerintahan saat ini, laporan keuangan merupakan salah satu sarana komunikasi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja dan aktivitas pengelolaan

keuangan pemerintah ke masyarakat / publik. Laporan keuangan haruslah menyajikan informasi yang bernilai yang sesuai dengan peraturan dan bebas dari penyimpangan agar bisa berguna dalam pengambilan keputusan nantinya (Pujiswara,

2014). Tetapi nyatanya fenomena pelaporan pemerintah masih banyak terdapat penyimpangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPK atas LKPD tercantum pada IHPS semester II tahun 2014 (LHP tahun 2013) BPK telah memeriksa 651 objek pemeriksaan, yaitu 135 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 479 objek pemeriksaan daerah dan BUMD, serta 37 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya.

Dari 651 LHP, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2014 mengungkapkan 7.950 temuan yang di dalamnya terdapat 2.482 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 7.789 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 40,55 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.923 permasalahan berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan (berdampak finansial) senilai Rp 14,74 triliun. Permasalahan finansial tersebut terdiri atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Rp 1,42 triliun, potensi kerugian Rp 3,77 triliun dan kekurangan penerimaan Rp 9,55 triliun. Selain itu terdapat 3.150 permasalahan ketidak-ekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 25,81 triliun (www.bpk.go.id).

Dan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat temuan dari entitas atas ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah. Termasuk Kabupaten Rokan Hilir di dalam IHP semester ii BPK RI

menjelaskan terdapat 16 total permasalahan yang bernilai 1.421,69 juta, selanjutnya segi kerugian daerah memiliki 7 permasalahan senilai 1.341,69 juta, terkait potensi kerugian daerah yaitu memiliki 3 permasalahan senilai 79,33 juta dan terkait nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan terdapat 3 permasalahan senilai 577,67 juta (www.bpk.go.id).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir TA 2013 ternyata masih belum ada perbaikan, ini bisa dilihat dari hasil penilaian BPK dalam siaran pers perwakilan Provinsi Riau yang masih memberikan opini WDP atas LKPD Rokan Hilir dari tahun ke tahun. Opini diberikan atas masalah yang terkait dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fenomena tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih belum seluruhnya memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Sehingga perlunya pembenahan terhadap sistem kerja pada pegawai pemerintah terutama bagian penatausahaan keuangan agar nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat serta bernilai informasi yang akurat. Informasi harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna, informasi yang bermanfaat ini adalah informasi yang mempunyai nilai.

Menurut Suwardjono (2013: 167) nilai informasi merupakan kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan dalam pengambilan keputusan. Informasi akan

bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.

Hal pertama yang berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011). Menurut Wahyono (2007) untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen pengendalian / kontrol yang akan menjaga sistem informasi dari kesalahan yang disengaja / tidak disengaja. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang informasi menghasilkan informasi yang bernilai. Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Yuliarta (2013) menyimpulkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariani (2014) yang menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Hal kedua yang memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi (Bodnar & Hopwood,

2009:3). Kaitannya dengan diadakannya pengembangan dari sistem informasi akuntansi ini adalah akan menambah nilai bagi pemerintah, karena dengan sistem informasi akuntansi, nilai bertambah dengan: memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya dalam mengumpulkan informasi ekonomi. (Rnrian.blogspot.com). Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Pujiswara (2014) menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Enjelina M (2014) yang menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Hal ketiga yang berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan adalah kompetensi pejabat penatausahaan keuangan. Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Menurut Wahyono (2007) sumber daya manusia dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai. Karena kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai. Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Yuliarta (2013) menyimpulkan bahwa Kompetensi Pejabat Penatausahaan berpengaruh

terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Husna (2013) yang menyimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan.

Karena dari fenomena yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dan juga penelitian-penelitian terdahulu di atas hasilnya belum konsisten maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi dan kompetensi pejabat penatausahaan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan kombinasi penelitian Yuliarta (2013) dan Ida Bagus Pujiswara (2014) dengan fokus penelitian sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, perbedaan yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan waktu penelitian yaitu Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah ? 2) Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah ? 3) Apakah kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan

keuangan daerah. 2) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. 3) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

TELAAH PUSTAKA

Nilai informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Suwardjono (2013:167) nilai informasi merupakan kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan dalam pengambilan keputusan. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.

Agar informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010): (a) Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. (b) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material. (c) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain. (d) dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

dapat dipahami oleh pengguna.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011).

Instansi pemerintah harus membangun dan memiliki sistem internal yang baik, karena seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan, kualitas laporan yang buruk menjadi salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengendalian intern. Sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian yang andal (Mahmudi, 2011:252).

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. (Bodnar & Hopwood:2009: 3).

Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah: 1) Mendukung operasi sehari-hari, 2) mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan 3) memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. (Kusrini dan Koniyo, 2007: 10).

Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Menurut Permendagri Nomor

2 Tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Memiliki sumber daya manusia yang kompeten adalah keharusan bagi pemerintah. Mengelola sumber daya manusia berdasarkan kompetensi tersebut diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan mencapai tujuan. Dikarenakan sumber daya manusia tersebut memahami dan mengerti serta mampu melakukan sehingga tujuan bisa dicapai dengan baik. (Hariani, 2014).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Sistem pengendalian intern terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. (PP no.60 tahun 2008).

Menurut Wahyono (2007) untuk mencapai informasi yang akurat, maka diperlukan komponen pengendalian/kontrol yang akan menjaga sistem informasi dari kesalahan yang disengaja/tidak disengaja. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang informasi menghasilkan informasi yang bernilai.

Hasil penelitian Yuliarta (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H1 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. (Bodnar & Hopwood : 2009 : 3). Sistem informasi akuntansi ini akan menambah nilai bagi pemerintahan, karena dengan sistem informasi akuntansi, nilai bertambah dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya dalam mengumpulkan informasi ekonomi. (Rnrian.blogspot.com).

Hasil penelitian Pujiswara (2014) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

H2: Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien.

Menurut Wahyono (2007) sumber daya manusia yang pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai. Kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai.

Hasil penelitian Yuliarta (2013) menyatakan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H3: Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 33 SKPD yang terdiri dari 17 dinas, 9 badan, 3 kantor, 1 inspektorat, 2 sekretariat, dan 1 RSUD. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *Purposive Sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubbag keuangan dan Bendahara pengeluaran. Setiap SKPD terdiri dari dua responden, sehingga jumlah responden sebanyak 66 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden (Kasubbag keuangan dan Bendahara pengeluaran).

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi

berganda yang digunakan mengukur antara variabel independen (sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan) terhadap variabel dependen (nilai informasi pelaporan keuangan daerah).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (Y)

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2013: 167).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diadopsi dari penelitian Yuliarta (2013). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan 12 item pertanyaan. Indikator pertanyaan yang terdiri dari: keterandalan, keterpahaman, keberpautan, nilai prediktif, nilai balikan, ketepatanwaktuan, ketepatan penyimbolan, keterujian, kenetralan, keterbandingan, dan materialitas. (PP No. 71 tahun 2010).

Sistem Pengendalian Intern (X1)

Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Permendagri No.21 Tahun 2011).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diadopsi dari penelitian Yuliarta

(2013). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan 15 item pertanyaan. Indikator pertanyaan terdiri dari: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. (PP No.60 Tahun 2008).

Sistem Informasi Akuntansi (X2)

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data lainnya ke dalam informasi. (Bodnar & Hopwood, 2009: 3).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diadopsi dari penelitian Enjelina M (2014). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan 10 item pertanyaan. Indikator pertanyaan terdiri dari: tingkat kecepatan, tingkat keamanan, tingkat efisiensi biaya, dan tingkat kualitas hasil. (Modul SIA: dunia akuntansi dan manajemen, 2008 dalam Enjelina M, 2014).

Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (X3)

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. (Permendagri No.2 Tahun 2013).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diadopsi dari penelitian Yuliarta (2013). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan 10 item pertanyaan. Indikator pertanyaan terdiri dari: staf yang

berkualitas, staf lulusan akuntansi, uraian peran dan fungsi yang jelas, peran dan tanggungjawab yang jelas, uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi, pedoman mengenai prosedur akuntansi (SAP), pelaksanaan proses akuntansi, sumber daya pendukung operasional, dan pelatihan-pelatihan untuk penguasaan dan pengembangan keahlian. (Yuliarta, 2013).

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan sum (Ghozali, 2013:19).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pada penelitian ini untuk uji validitas menggunakan *Korelasi Bivariate Pearson* yaitu dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid, begitu sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ nomor item tersebut tidak valid (Sulistyo, 2010: 40).

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *Cronbach's Alpha* karena metode ini cocok digunakan pada skor berbentuk skala (1-6) atau skor rentang (misal 0-60). Jika koefisien alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,60 ($\alpha > 0,60$) maka instrument tersebut dikatakan reliabel, apabila sebaliknya alpha lebih rendah dari 0,60 ($\alpha < 0,60$). Maka instrument tersebut tidak reliabel (Sulistyo, 2010:46).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan metode *Kolmogorov-smirnov test*. Jika Pvalue (sig.) $> 0,05$ maka H_0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan data diambil dari populasi yang berdistribusi normal (Sulistyo, 2010:52).

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* > 10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013:106).

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini digunakan grafik *scatterplot* yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tetapi jika titik-titik membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka telah terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013: 139).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, maka dalam hal ini terdapat *problem* autokorelasi (Ghozali, 2013:110). Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2

sampai 2.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan) dengan variabel dependen (nilai informasi pelaporan keuangan) apakah hubungan variabel independen atau dependen berhubungan positif dan negatif.

Dengan Persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

X₁ = Sistem Pengendalian Intern

X₂ = Sistem Informasi Akuntansi

X₃ = Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

e = Variabel Pengangguan (error)

α = Konstanta

β = Koefisien arah regresi

Uji Hipotesis (t-test)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel sistem pengendalian intern (X₁), sistem informasi akuntansi (X₂), dan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan (X₃) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah (Y) dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi jika nilai t_{hitung} yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari α = 5% berarti variabel sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dalam penelitian ini, apabila R² bernilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut. Apabila R² bernilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa semua variasi dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen memberikan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:169).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah 33 SKPD di Kabupaten Rokan Hilir. Setiap SKPD masing-masing terdiri dari dua responden. Dari 33 SKPD tersebut disebarakan sebanyak 66 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali dan semuanya mengisi dengan lengkap sebanyak 60 kuesioner sehingga bisa dilanjutkan untuk diolah.

Hasil Analisis Data

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif ini terlihat pada tabel 1

Tabel 1

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	60	39.00	60.00	48.6667	4.97338
Sistem Pengendalian Intern	60	44.00	75.00	57.2500	5.78316
Sistem Informasi Akuntansi	60	32.00	50.00	39.5167	4.80287
Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan	60	32.00	50.00	40.9333	4.89852
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data Olahan 2015

Dari tabel 1 di atas, untuk nilai

informasi pelaporan keuangan daerah dapat dilihat bahwa nilai maksimum sebesar 60.00 dan minimum 39.00 dengan rata-rata 48,6667 dan standar deviasi 4.97338. Variabel sistem pengendalian intern dapat dilihat bahwa nilai maksimum sebesar 75.00 dan minimum 44.00 dengan rata-rata 57,2500 dan standar deviasi 5.78316.

Variabel sistem informasi akuntansi dapat dilihat bahwa nilai maksimum sebesar 50.00 dan minimum 32.00 dengan rata-rata 39.5167 dan standar deviasi 4.80287. Variabel kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dapat dilihat bahwa nilai maksimum sebesar 50.00 dan minimum 32.00 dengan rata-rata 40.9333 dan standar deviasi 4.89852.

Hasil Uji Validitas

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan *Corrected Item-Total Correlation* di mana $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dan r_{tabel} untuk $N = 60$ adalah 0,254. Berdasarkan hasil pengolahan data untuk instrumen nilai informasi pelaporan keuangan daerah diketahui nilai dari *Corrected Item -Total Correlation* terkecil 0,472. Instrumen sistem pengendalian intern nilai terkecil 0,299. Instrumen sistem informasi akuntansi nilai terkecil 0,397. Dan instrumen kompetensi pejabat penatausahaan keuangan nilai terkecil 0,599. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan variabel sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan nilai informasi pelaporan keuangan daerah adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil dari pengujian ini me-

nunjukkan bahwa untuk instrumen nilai informasi pelaporan keuangan daerah 0,835, sistem pengendalian intern 0,789, sistem informasi akuntansi 0,840, dan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan 0,871. Dengan demikian instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel karena koefisien *cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata jawaban responden terdistribusi normal. Pengujian ini akan terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	Sistem Pengendalian Intern	Sistem Informasi Akuntansi	Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan
N		60	60	60	60
Normal	Mean	48.6667	57.2500	39.5167	40.9333
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	4.97338	5.78316	4.80287	4.89852
	Absolute	.136	.118	.127	.142
Most Extreme	Positive	.136	.110	.127	.142
Differences	Negative	-.096	-.118	-.059	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		1.055	.916	.981	1.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.216	.371	.291	.176

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data Olahan 2015

Dari hasil pengujian yang terlihat di tabel 2 diolah menggunakan SPSS versi 20.00 didapat bahwa nilai *Asymp sig. Kolmogorov - Smirnov (K-S)* lebih besar dari $\alpha 5\%$, yaitu nilai informasi 0,216, sistem pengendalian intern 0,371, sistem informasi akuntansi 0,291, dan kompetensi pejabat penatausahaan 0,176. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil dari uji multikolinearitas melalui olah data SPSS ini dapat dilihat dari tabel 3

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Sistem Pengendalian Intern	.780	1.283	Bebas Multikolinearitas
Sistem Informasi Akuntansi	.500	1.998	Bebas Multikolinearitas
Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan	.511	1.955	Bebas Multikolinearitas

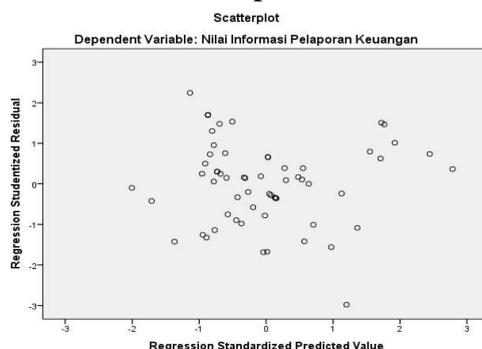
Sumber: data Olahan 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian multikolinearitas terdapat pada besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Untuk variabel sistem pengendalian intern dengan nilai VIF 1,283 < 10 dan *tolerance* 0,780 > 0,10, sistem informasi akuntansi dengan nilai VIF 1,998 < 10 dan *tolerance* 0,500 > 0,10, kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dengan nilai VIF 1,955 < 10 dan *tolerance* 0,511 > 0,10. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dengan model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan diagram Scatterplot yang terlihat pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1
Scatterplot



Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan gambar di atas

terlihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan *Durbin-Watson* yang terlihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Batas Bawah	Batas Atas	Durbin Watson	Keterangan
-2	+2	1,445	Tidak Terdapat Autokorelasi

Sumber: Data Olahan 2015

Dari tabel di atas angka *Durbin-Watson* yang menunjukkan angka 1,445 untuk dependen, berarti *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2 = -2 < 1,445 < 2. Dengan demikian tidak terdapat autokorelasi dan data menunjukkan layak untuk diteliti.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hasil dari analisis regresi berganda akan terlihat pada tabel 5

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.238	5.002		2.047	.045
Sistem Pengendalian Intern	.208	.088	.242	2.368	.021
1 Sistem Informasi Akuntansi	.365	.132	.352	2.758	.008
Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan	.295	.128	.290	2.298	.025

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Sumber : Data Olahan 2015

Dari hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan $\alpha = 0,05$.

Persamaan regresi berganda dapat di lihat sebagai berikut:

$$Y = 10,238 + 0,208X_1 + 0,365X_2 + 0,295X_3 + e$$

Keterangan:

Y= Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

X₁ = Sistem Pengendalian Intern

X₂ = Sistem Informasi Akuntansi

X₃= Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

e = Variabel Pengangguan (error)

α = Konstanta

β = Koefisien arah regresi

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Dari hasil analisis regresi berganda dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,368) > (2,003) dan sig. (0,021) < (0,05). Maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Dengan demikian berarti, terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Jadi hal ini mengindikasikan dengan diterapkannya sistem pengendalian intern secara baik di pemerintahan maka nilai informasi pelaporan keuangan juga akan meningkat dan menghasilkan nilai yang baik sehingga bagi pemakai bisa mengambil keputusan yang tepat ke depannya.

Hasil penelitian ini juga mendukung literatur yang mengatakan bahwa untuk mencapai informasi yang akurat, maka memerlukan komponen pengendalian / kontrol yang akan menjaga sistem informasi dari kesalahan yang disengaja / tidak disengaja. Dengan

adanya komponen kontrol dapat menunjang informasi menghasilkan informasi yang bernilai. (Wahyono, 2007).

Selain itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliarta (2013) dan Enjelina M (2014) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariani (2014) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Dari hasil analisis regresi berganda dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,758) > (2,003) dan sig. (0,008) < (0,05). Maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Dengan demikian berarti, terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem informasi akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Jadi, hal ini mengindikasikan bahwa dengan memiliki software akuntansi yang bisa mendukung kinerja keuangan dari pemerintahan maka akan menghasilkan laporan keuangan yang bernilai baik.

Penelitian ini sejalan dengan literatur yang mengatakan bahwa dengan sistem informasi akuntansi, nilai bertambah dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya dalam mengumpulkan informasi ekonomi (Rnrian.blogspot.com).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiswara (2014) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Enjelina M (2014) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Dari hasil analisis regresi berganda dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,298 > (2,003)$) dan $sig. (0,025) < (0,05)$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian berarti, terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Jadi, hal ini mengindikasikan bahwa dengan dimilikinya pejabat penatausahaan keuangan yang kompeten dan berpengalaman dalam mengelola keuangan akan dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan menjadi lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan literatur yang mengatakan bahwa sumber daya manusia yang pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai. Kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai. (Wahyono, 2007).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Yuliarta (2013) Hariani (2014) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husna (2013) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian Koefisien Determinasi ($Adj.R^2$) terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.542	.518	3.45327

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi

b. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Sumber: Data Olahan 2015

Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,518. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap variabel terikat yaitu nilai informasi pelaporan keuangan daerah 51,8%, sedangkan 48,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti: pengawasan daerah, pemanfaatan teknologi dan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Sistem pengendalian intern berpengaruh

terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Ini berarti bahwa hipotesis pertama diterima. 2) Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Ini berarti bahwa hipotesis kedua diterima. 3) Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Ini berarti bahwa hipotesis ketiga diterima. 4) Koefisien determinasi ($Adj. R^2$) sebesar 51,8% menyatakan nilai informasi pelaporan keuangan daerah dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 48,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini seperti teknologi informasi dan lain-lain.

Saran

Beberapa saran dari peneliti yaitu: 1) Bagi instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan bagian pejabat penatausahaan keuangan selalu diberikan pelatihan-pelatihan agar menambah wawasan dalam mengelola keuangan daerah. 2) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan memperbanyak jumlah responden. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang jelas. 3) Selain itu diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Dan kuesioner setiap variabel sebaiknya menggunakan kuesioner yang baru dan sesuai dengan gambaran keadaan suatu daerah. 4) Bagi penelitian selanjutnya dapat

dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar George H., Hopwood William S. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 9. Yogyakarta: Andi.
- Enjelina M, Maria. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan di Kabupaten Rokan Hulu. *Skripsi*. Tidak dipublikasikan. Universitas Riau.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM. SPSS 20* Edisi 7 : Penerbit UNDIP.
- Hariani, Desi. 2014. *Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu*. *Skripsi*. Tidak dipublikasikan. Universitas Riau.
- Husna, Fadhilla. 2013. *Pengaruh Kualitas Manusia, Pengawasan keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada SKPD Kota Padang Panjang*. Artikel

- ilmiah. Universitas Negeri Padang.
- Kusrini, dan Koniyo, Andri. 2007. *Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic Microsoft SQL Server*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pujiswara, Ida Bagus.2014. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Penelitian: Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.2 no.1.
- Sulistiyo, Joko. 2010. *6 Hari Jago SPSS*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Wahyono, Teguh. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi: Desain dan pemrograman komputer*. Yogyakarta: Andi.
- Yuliarta. 2013. Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Universitas Negeri Padang*, Vol.1 No.1 .
- BPK RI perwakilan Provinsi Riau. 2015. Siaran pers. pekanbaru.bpk.go.id?p=18165 (online) diakses pada 06 Mei 2015.
- BPK RI. 2015. IHPS. www.bpk.go.id/ihps (online) diakses pada 11 Mei 2015.
- Rnrian.blogspot.com. 2012. Sistem informasi akuntansi. <http://rnrian.blogspot.com/2012/10/sistem-informasi-akuntansi.html> (online). Diakses pada 11 Mei 2015